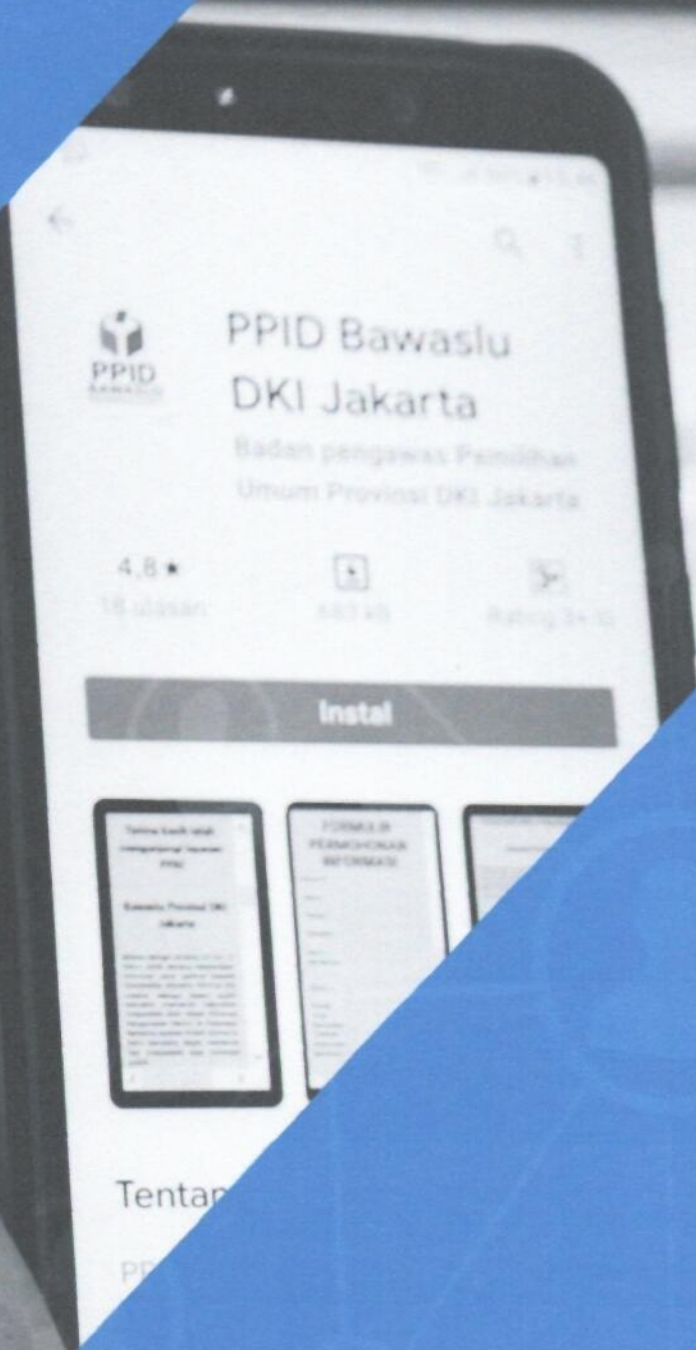




BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA



2
0
2
1

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Penetapan Struktur PPID.....	2
D. Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2021	3
E. Program PPID	15
F. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK..	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	16
B. Sumber Daya Manusia.....	20
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	21
D. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	23
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	23
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	23
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak.....	24
E. Data Statistik Website PPID.....	24
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN.....	27
BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	28
BAB VI INOVASI	
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	29
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	29
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik....	29
BAB VII KENDALA	
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	30
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	30

BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal..... 31**
- B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal..... 31**
- C. Pelaksanaan Rekomendasi / RTL Tahun Sebelumnya..... 31**

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyusun Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dimana ini menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengimplementasikan 7 (Tujuh) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari:

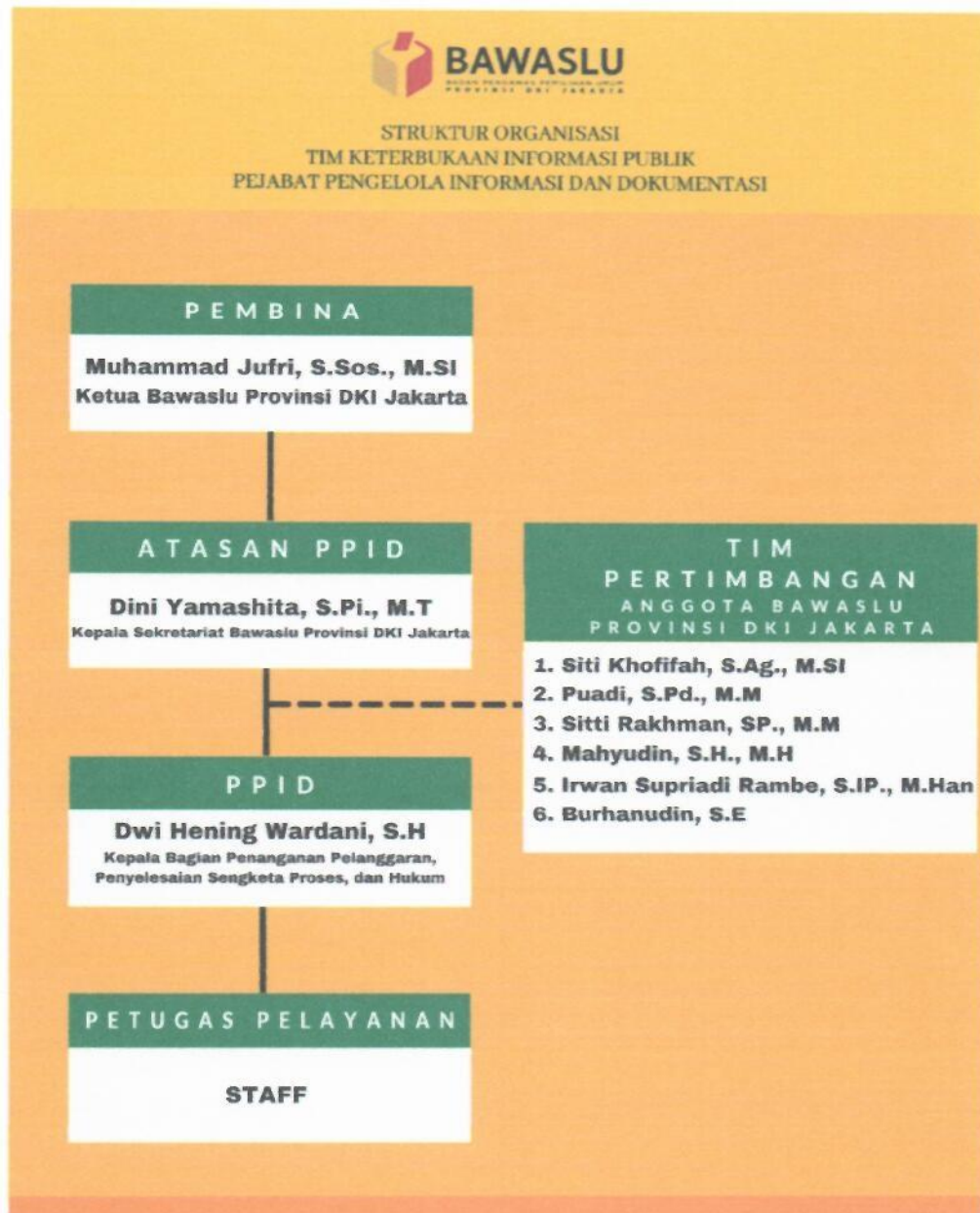
- (1) SOP Pelayanan Informasi;
- (2) SOP Pengelolaan Informasi Publik;
- (3) SOP Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan;
- (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- (5) SOP Penyusunan dan Penyampaian Layanan Informasi Publik;
- (6) SOP Penanganan Keberatan Informasi;
- (7) SOP Penanganan Sengketa Informasi;

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

C. Penetapan Struktur PPID

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan struktur PPID yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Struktur organisasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 010.A/TI.02.00/K.JK/08/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019




membuat PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta semakin kuat dari struktur kelembagaan.



Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

D. Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2021

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi adalah menyusun daftar informasi publik (DIP). Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengumumkan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi diumumkan secara berkala yang dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Bawaslu DKI Jakarta (ppid.jakarta.bawaslu.go.id). Selain informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

<p>Informasi Berkala, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi hasil penelitian; 2. Informasi Mengenai Keuangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; 3. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik; 4. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian; 5. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; 6. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta; <p>Scan :</p> <p>Informasi Berkala</p>  <p>Informasi Setiap Saat, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Mengenai Keuangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 3. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Informasi Hasil Penelitian 5. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu 6. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian  <p>Scan :</p> <p>Informasi Setiap Saat</p> <p>Informasi Serta Merta, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Mengenai Penanganan Pelanggaran 2. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu 3. Informasi Mengenai Penyelesaian Sengketa  <p>Scan :</p> <p>Informasi Serta Merta</p>
--	--

Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	Keterangan
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat						
I. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu						
1.	Alur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Alur Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Pemilu	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Alur Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Pemilihan	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft Copy	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
5.	Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

6.	Alur Penyelesaian Sengketa Cepat	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
II. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu						
1.	Profil Singkat Pimpinan	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Profil Singkat Sekretariat	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Struktur Organisasi	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Tugas dan Fungsi	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
5.	Visi dan Misi	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	Alamat Lengkap	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
III. Informasi Mengenai Keuangan						
1.	SOP Mekanisme Pengajuan Anggaran Satuan Kerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan						
1.	Road map Reformasi Birokrasi 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Data Pegawai PNS Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Data Pegawai PPNPN Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Data Pegawai Teknis PNS dan PPNPNS Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

5.	Simpeg Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	Informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
7.	SOP Penyusunan Rencana Kerja (Divisi Organisasi)	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
8.	SOP Kelengkapan File Pegawai (Divisi SDM)	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
9.	SOP Satker Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan rapat Sekretariat	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik

1.	laporan mengenai akses Informasi Publik	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Survey layanan informasi publik	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Form permohonan informasi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Form pengajuan keberatan informasi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
5.	Informasi hak dan kewajiban pemohon informasi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	Informasi hak dan kewajiban Bawaslu dalam pelayanan informasi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

7.	Informasi mengenai tata cara memperoleh Informasi Publik	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
8.	Informasi biaya permohonan informasi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
9.	Informasi Jadwal waktu Pelayanan Informasi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
10.	Informasi mengenai tata cara Prosedur pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
11.	DIP 2020	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
12.	DIP 2021	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
13.	SOP Pelayanan Informasi Provinsi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
14.	SOP Penanganan Keberatan Informasi Provinsi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
15.	SOP Penanganan Sengketa Informasi Provinsi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
16.	SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan Provinsi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
17.	SOP Pendokumentasian Informasi Publik Provinsi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
18.	SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Informasi Provinsi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
19.	SOP Penyusunan DIP Provinsi	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
20.	SOP Uji Konsekuensi					

VI. Informasi Hasil Penelitian						
1.	Buku Bingkai Pemilu Menguatkan Pengawasan, Mewujudkan Keadilan	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Buku Mengawal Demokrasi Menegakkan Konstitusi	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Buku Sejarah dan Kiprah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2012-2019	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Maret 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
5.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Juni 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi September 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
7.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Desember 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
8.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Maret 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
9.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Juni 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
10.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi September 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
11.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Desember 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

12.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Maret 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
13.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi September 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
14.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Desember 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
15.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi April 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
16.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Agustus 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala						
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu						
1.	Profil Singkat Pimpinan	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Profil Singkat Sekretariat	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Profil Singkat PPID	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu						
1.	Agenda Kegiatan	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Pengumuman dan Penerimaan	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2015-2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

5.	Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
7.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
8.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
9.	Renstra Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2020-2024	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
10.	Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
11.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
12.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
13.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

	DKI Jakarta Tahun 2020					
14.	Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
15.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
16.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
17.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

III. Informasi Mengenai Keuangan

1.	DIPA 2019	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Laporan Keuangan (Audited) Tahun 2020	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	RKA 2019	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Rencana Kerja Tahun 2020	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
5.	Rencana Kerja Tahun 2021	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	BMN	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

7.	Laporan BMN (Audited) Tahun 2020	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
8.	Pagu dan Realisasi	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
9.	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
10.	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMN	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan						
1.	LHKPN 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	LHKPN 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik						
1.	ringkasan laporan mengenai akses Informasi Publik	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	DIP 2020	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	DIP 2021	Sub Bagian Humas & Hubal	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
VI. Informasi Hasil Penelitian						
1.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Maret 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Juni 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi September 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Desember 2018	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

5.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Maret 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Juni 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
7.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi September 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
8.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Desember 2019	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
9.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Maret 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
10.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi September 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
11.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Desember 2020	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
12.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi April 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
13.	Jurnal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Edisi Agustus 2021	Sub Bagian SDM dan Umum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2021	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta

I. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu

1.	Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2017	Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Laporan Akhir Pengawasan 2019	Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

3.	Pengawasan Partisipatif	Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
II. Informasi Mengenai Penyelesaian Sengketa						
1.	Rekap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Putusan Sengketa Proses Pemilu	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Putusan MK Terkait PHPU di Wilayah DKI Jakarta	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
III. Informasi Mengenai Penanganan Pelanggaran						
1.	Rekap Dugaan Pelanggaran Pilkada 2017	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
2.	Klasifikasi Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
3.	Rekap Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
4.	Penerimaan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
5.	Putusan Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai
6.	Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terkait Tindak Pidana Pemilu 2019	Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, 2020	Hard & Soft	Selama Berlaku	Tersedia Selesai

E. Program PPID

Di tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Peningkatan kapasitas untuk mendukung implementasi yang optimal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

F. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta dengan melaksanakan rapat pengelolaan data dan informasi yang mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pembekalan mengenai pengelolaan data dan informasi dalam rapat pengelolaan Data dan Informasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi yang diantaranya melalui:

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan beberapa perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, computer, buku, jurnal, ruang tunggu, serta beberapa formulir layanan informasi publik diantaranya; formulir permintaan informasi publik, formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, formulir tanda bukti penyerahan informasi publik, formulir pemberitahuan tertulis, dan formulir pengajuan keberatan. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Gambar 2. Desk Layanan PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Layanan Ruang Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada hari kerja dari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerapkan protokol

kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke kantor Bawaslu DKI Jakarta dengan dilakukan pengecekan suhu badan dan pemberian hand sanitizier serta diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti masker di dalam lingkungan gedung kantor Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

b. Website Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki 3 (tiga) website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik yaitu:

- Website UTAMA yang mempublikasikan kinerja Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui berita yang aktual dan update.



Website utama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beralamat di:

<https://jakarta.bawaslu.go.id/>

- Website PUSTAKA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA adalah website yang memuat seluruh informasi kepemiluan yang dituangkan dalam buku dan jurnal yang di terbitkan oleh Bawaslu Provinsi KDI Jakarta.



Website Library Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beralamat di:

<https://library.jakarta.bawaslu.go.id/>

- Website PPID BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA adalah website yang memuat seluruh data dan informasi pemilihan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.








Website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beralamat di:
<https://ppid.jakarta.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara periodik melakukan pembaharuan data dan informasi website, hal ini dilakukan dalam rangka menampilkan informasi terbaru dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi masyarakat

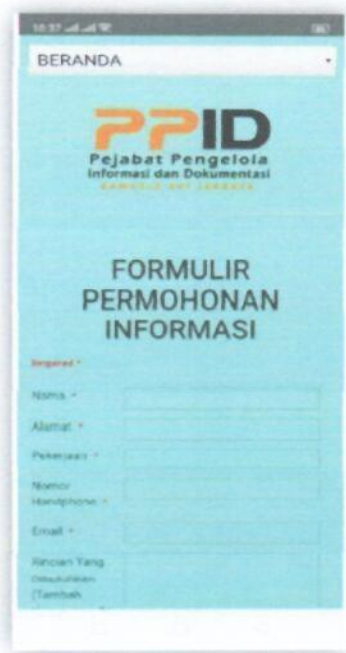
c. Media Sosial

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggunakan media sosial/jejaring sosial sebagai salah satu saluran komunikasi publik. Melalui media sosial, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyebarluaskan informasi mengenai Pemilihan dan Kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Media Sosial	Alamat Akun
	BawasluDKI_JKT
	ppidbawasluprovinsidkijakarta
	BawasluDKI_JKT
	BawasluDKI
	Bawaslu DKI Jakarta

d. Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta *Mobile*

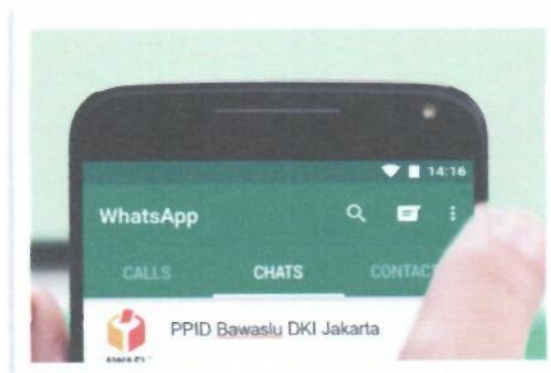
Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mobile Berbasis Android Sejalan mengikuti perkembangan teknologi dan komitmen Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 telah merilis aplikasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mobile berbasis android yang dapat di unduh melalui Playstore. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan permohonan informasi dengan menggunakan gawai yang terkoneksi dengan internet.



Gambar 4. Aplikasi Android Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

e. **Contact Center WA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui aplikasi pesan instan *WhatsApp* dengan nomor: 0811-9774-755



Gambar 5. Contact Center WA

f. Email

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui alamat e-mail ppid@jakarta.bawaslu.go.id

g. Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon/fax: (024)76423074 dan (024) 8505189. Pemohon informasi akan didata oleh staf pelayanan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi

B. Sumber Daya Manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik yang ada di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta strukturnya yang tertuang dalam SK PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebanyak 20 (dua puluh) orang, yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Jufri	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina/Pengarah
2.	Siti Khopipah	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
3.	Sitti Rakhman	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
4.	Puadi	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
5.	Mahyudin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
6.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
7.	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan / Penanggung Jawab
8.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Atasan PPID / Ketua

9.	Dwi Hening Wardani	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	PPID / Wakil Ketua
10.	Rahardianti K	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
11.	A Nur Hikmah N	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
12.	Bertoni Sibarani	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
13.	Raka Daylami MS	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
14.	Yandi Dwi Himawan	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
15.	Siti Musyarofah	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
16.	Bahrur Rosi	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
17.	Riniyanto	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
18.	Muhammad Fachri	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
19.	Jimmi Mustafa	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota
20.	Eko Sudianto	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi	Petugas Pelayanan / Anggota

C. Penggunaan Anggaran

Pada tahun anggaran 2021, anggaran pengelolaan informasi publik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 90.000.000,-. Dimana Rp 15.000.000,- digunakan untuk pembentukan kelompok kerja PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Rp 75.000.000,- untuk rapat dan peningkatan kapasitas pengelolaan informasi publik di Bawalsu Provinsi DKI Jakarta.

D. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Selain mengelola keterbukaan informasi publik, selama tahun 2021 PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Lokasi	Waktu
1.	Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik	Aula Graha Demokrasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	3 Juni 2021
2.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Hotel Shalva, Jakarta Pusat	10 Juni 2021

Selain kegiatan tersebut diatas, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendorong sarana dan prasarana PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, membangun *website* PPID Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempermudah pelayanan informasi kepada publik, dan lain-lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

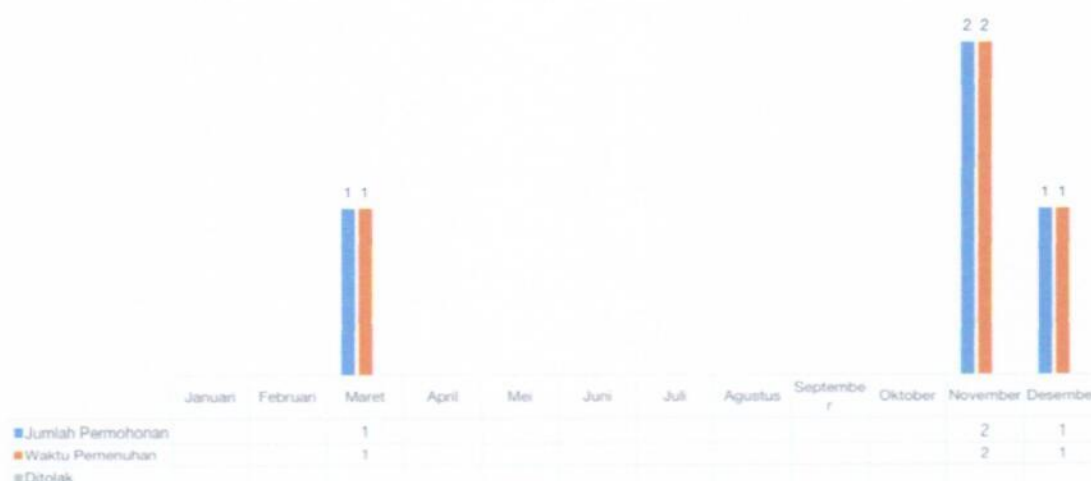
selama tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima 4 permohonan informasi publik. Jumlah permohonan ini menurun jika di bandingkan permohonan informasi publik pada tahun 2020 yang berjumlah 5 pemohon informasi.

No	2020	2021
1	5	4

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sepanjang tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memenuhi permohonan informasi dalam waktu 1 hingga 3 hari.

Pemenuhan Permohonan Informasi Berdasarkan Hari



C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2021, terdapat 4 permohonan informasi diterima oleh PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan 4 permohonan tersebut telah di kabulkan serta diberikan informasinya kepada pemohon.

No	Nama Pemohon	Tanggal	Latar Belakang	Tujuan Penggunaan Informasi
1	Reza teguh sulistyو	21 Maret 2021	Mahasiswa	Skripsi

2	Faried Huda	16 November 2021	Mahasiswa	Skripsi
3	Eko Wardaya	18 November 2021	Mahasiswa	Penelitian Tugas Akhir Fakultas Hukum
4	Rifqi Naufal Putra	22 Desember 2021	Mahasiswa	Skripsi

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Selama tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak ada menolak permohonan informasi disebabkan seluruh permohonan informasi yang di terima PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dapat terpenuhi seluruhnya dan telah diberikan informasinya kepada pemohon.

E. Data Statistik Website PPID

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan Website melakukan Analisa terhadap pengunjung website guna meningkatkan pelayanan informasi publik agar semakin baik.

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml. Pengunjung
1	Website Utama	http://jakarta.bawaslu.go.id	6.049
2	Website PPID	http://ppid.jakarta.bawaslu.go.id	683
3	Pustaka digital	http://library.jakarta.bawaslu.go.id	177

Sepanjang tahun 2021 terdapat 683 user yang mengunjungi website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, ini merupakan peningkatan pengunjung dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 519 pengunjung website PPID. Dimana jenis informasi yang paling banyak di cari oleh pengunjung website adalah informasi kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

No	2020	2021
1	519 Pengunjung	683 Pengunjung

Sepanjang tahun 2021, pengunjung website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggunakan beberapa perangkat dalam melakukan akses terhadap website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta



Selain melalui saluran website, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga aktif dalam memberikan informasi melalui media sosial yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Berikut perkembangan media sosial milik Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml. Pengunjung /Follower
1	Instagram	BawasluDKI_JKT	2.196
2	Instagram	ppidbawasluprovinsidkijakarta	135
3	Facebook	BawasluDKI	1.129
4	Twitter	BawasluDKI_JKT	191
5	Youtube	Humas Bawaslu DKI Jakarta	742

Dengan adanya Analisa terhadap pengunjung website dan pengikut di media sosial, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan informasi publik agar dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat luas sehingga diharapkan pelayanan informasi publik melalui website PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat lebih baik di tiap tahun nya.

Adapun untuk alamat website Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Alamat Akun
1	Bawaslu Jakarta Pusat	http://jakarta.bawaslu.go.id

2	Bawaslu Jakarta Selatan	http://jakartaselatan.bawaslu.go.id
3	Bawaslu Jakarta Barat	http://jakartabarat.bawaslu.go.id
4	Bawaslu Jakarta Utara	http://jakartautara.bawaslu.go.id
5	Bawaslu Jakarta Timur	http://jakartatimur.bawaslu.go.id
6	Bawaslu Kepulauan Seribu	http://kepulauanseribu.bawaslu.go.id

Selain website utama, Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga telah memiliki website PPID dengan alamat sebagai berikut:

No	Wilayah	Alamat Akun
1	Bawaslu Jakarta Pusat	http://ppid.jakarta.bawaslu.go.id
2	Bawaslu Jakarta Selatan	http://ppid.jakartaselatan.bawaslu.go.id
3	Bawaslu Jakarta Barat	http://ppid.jakartabarat.bawaslu.go.id
4	Bawaslu Jakarta Utara	http://ppid.jakartautara.bawaslu.go.id
5	Bawaslu Jakarta Timur	http://ppid.jakartatimur.bawaslu.go.id
6	Bawaslu Kepulauan Seribu	http://ppid.kepulauanseribu.bawaslu.go.id

Selain melalui website utama dan website PPID, Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pembaruan dan pelayanan informasi melalui akun-akun media sosial. Berikut daftar akun media sosial Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

No	Jenis Media	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu
1	Instagram	@bawaslu kota.jakpus	Bawaslu_jakarta_selatan	bawaslujakbar	@bawaslujakut	bawaslujakartatimur	bawaslu_kep.seribu
2	Facebook	Bawaslu Kota Jakpus	Bawaslu Jakarta-Selatan	Bawaslu kota Jakbar	Bawaslu Jakarta Utara	Bawaslu Kota Jakarta Timur	Bawaslu_Ke p1000
3	Twitter	@bawaslujp	@Bawaslu_Jaksel	bawaslujakbar	@bawaslu_kotaju	@Bawaslu Jaktim	Bawaslu Kepulauan Seribu
4	Youtube	Humas Bawaslu Jakpus	Tim Humas Bawaslu Jaksel	humas bawaslu jakarta barat	Bawaslu jakut	BAWASLU KOTA JAKARTA TIMUR	Bawaslu Kepulauan Seribu

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

BAB VI

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan informasi publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengelolaan informasi dalam bentuk data fisik dan digital.

B. Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Berikut inovasi yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2021:

- 1) Perubahan ruang pelayanan informasi publik
- 2) Perubahan tampilan website PPID
- 3) Nomor Hotline PPID
- 4) Integrasi website PPID dengan Hotline PPID

C. Inovasi yang berkaitan dengan penyusunan informasi daftar informasi publik

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan update Daftar Informasi Publik secara berkala dengan melakukan koordinasi di setiap bagian untuk menyusun daftar informasi yang dapat di publikasikan.

BAB VII

KENDALA

A. Kendala internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, SDM yang membantu tugas Pejabat PPID jumlahnya terbatas, dan bertanggung jawab terhadap beberapa tugas lainnya. Sehingga dapat sedikit berpengaruh dalam pengelolaan dan pelayanan publik.

B. Kendala eksternal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pemohon informasi tidak semua yang mengisi survey kepuasan pelayanan informasi publik, hal ini berdampak pada sulitnya PPID untuk menilai hasil dari pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal

perlu ada kemampuan teknis mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam memaksimalkan pengelolaan dan pelayan informasi publik. Untuk itu peningkatan anggaran sangat dibutuhkan dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala Eksternal

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan terlebih dahulu kuisisioner survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik sebelum memberikan jawaban atas permohonan pemohon informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Pada Laporan Layanan Informasi tahun 2021, Bawaslu Republik Indonesia merekomendasikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Dapat memperkaya informasi rincian pelayanan dengan menambahkan latar belakang pemohon dan tujuan permohonan;
2. Dapat per kaya informasi publikasi web dengan menyampaikan jenis informasi yang paling banyak diakses oleh pengunjung web;
3. Melengkapi laporan dengan rekomendasi laporan tahun sebelumnya beserta uraian dan tindak lanjutnya; dan
4. Menyampaikan laporan layanan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 kepada Komisi Informasi DKI Jakarta.

Melalui komitmen yang kuat untuk menyajikan informasi publik, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rekomendasi yang telah di berikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Diantaranya dengan telah menambahkan rincian latar belakang pemohon dan tujuan permohonan informasi. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah menyampaikan jenis informasi yang paling banyak di akses oleh pengunjung website PPID. Pada laporan layanan informasi tahun 2021 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah dilengkapi hasil dari rekomendasi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah menyampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2020 kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan tahunan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini disusun sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 197004091999032001

Demikian laporan tahunan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini disusun sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T
NIP. 197004091999032001